

**RENJA**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA**

*tahun 2023*

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor : 14 Tahun 2007 Tentang : Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui rancangan awal RKPD untuk keterpaduan Rancangan Kerja OPD.

Sesuai amanat tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti yang tertuang dalam RPJMD dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 – 2023 yaitu **Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing**. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and clean Government*);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Sesuai dengan peran Badan Pengelola Keuangan Daerah Pengelola Keuangan Daerah pada Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023 Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam merumuskan tujuan dan sasaran mengacu pada Misi 2 RPJMD 2018-2023 dengan Sasaran dan Indikator Sasaran yaitu :

Misi 2 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and clean Government*);

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
  - Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran
  - Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran
  - Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah
  - Presentase Menurunnya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

- Presentase Peningkatan PAD

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan sistematis untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja organisasi. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator pencapaian sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen ini. Hasil evaluasi menjadi bahan pengukuran kinerja organisasi dan bahan penyusunan rencana kerja peningkatan kinerja organisasi untuk periode berikutnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 80);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023.
  7. Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Staretegis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar program dan kegiatan, antar urusan

pemerintahan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) untuk unit Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja ini terdiri dari beberapa aspek terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam peningkatan kualitas dan sistem perencanaan pembangunan dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Arah Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V PENUTUP

**BAB II.**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama Tahun 2021 dan perkiraan target Tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcomes). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran target kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

Memperhatikan realisasi diatas pencapaian kinerja tahun 2021 terdapat 1 (satu) capaian kinerja yang mencapai target yakni Tingkat Kecepatan Pelaksanaan Anggaran yang ditargetkan 100% terealisasi dengan tingkat capaian 100%. Capaian kinerja yang tidak mencapai target adalah Tingkat Kecepatan Perencanaan Anggaran yang ditargetkan 100% dapat terealisasi dengan tingkat capaian 97,22%, dan Persentase Peningkatan PAD yang ditargetkan 10% terealisasi -19,29% dengan tingkat capaian -172%. Sedangkan dua indikator kinerja lainnya belum yakni Tingkat Kecepatan Penyajian LKPD dan Persentase Menurunnya Temuan Terkait Penatausahaan dan Pengelolaan BMD sampai dengan penyusunan dokumen ini belum adanya hasil audit dari BPK RI. Penjelasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Tingkat kecepatan perencanaan anggaran yang diukur dengan konsistensi antara Program yang ada di PPAS terhadap Program yang ada di APBD tingkat capaian 100%, yang berarti bahwa seluruh program pada PPAS dapat dijabarkan dalam APBD.
2. Tingkat kecepatan pelaksanaan anggaran yang diukur dengan persentase SKPD yang melaksanakan anggaran sesuai dengan anggaran kas adalah indikator yang menggambarkan tingkat kematangan perencanaan anggaran yang turut mempengaruhi kepatuhan dalam pelaksanaannya. Indikator kinerja ini ditargetkan 100% pada tahun 2021, terealisasi 100,00% atau tingkat capaian 100,00%.
3. Tingkat kecepatan penyajian LKPD diukur dengan jumlah komponen pelaporan LKPD yang disajikan secara berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial sebagai berikut:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - 3) Laporan Operasional;
  - 4) Laporan Perubahan Ekuitas;



- 5) Neraca;
- 6) Laporan Arus Kas;
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2021, dari 7 (tujuh) komponen LKPD ditargetkan 100% atau seluruhnya disajikan secara berkualitas yang artinya tidak terdapat salah saji yang mempengaruhi opini LKPD. Namun demikian sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja ini LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baru diserahkan ke BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dan belum dilakukan audit sehingga capaian target yang telah ditetapkan belum dapat disajikan.

4. Persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMD yang ditargetkan menurun 11% pada tahun 2021 sampai dengan penyusunan dokumen ini masih sementara proses audit oleh BPK-RI sehingga hasil capaian untuk tahun 2021 belum dapat disajikan.
5. Indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target yakni capaian hanya -17,29% dari target peningkatan 10% atau tingkat capaian -172%. Tidak tercapainya realisasi dari target yang telah ditentukan dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi terutama masa pandemic Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat khususnya yang ada di Bolaang Mongondow Utara. Hal ini membuat realisasi pajak menurun karena pendapatan masyarakat juga ikut turun. Banyak usaha yang tutup atau mengalami penurunan omzet



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sampai saat ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung Kepada Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Tugas Pokok adalah membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
2. Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah :

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah
- b. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis pengelolaan keuangan daerah
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan Daerah
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan keuangan daerah
  - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi;
  - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
  - Menyiapkan pelaksanaan pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - Melakukan penagihan piutang daerah;
  - Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - Menyajikan informasi keuangan daerah.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perencanaan Strategis dengan tujuan mengarahkan penyusunan program kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Sasaran strategis jangka menengah Renstra Perangkat Daerah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 ( Lima ) tahun kedepan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah yakni melaksanakan administrasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah masuk dalam Misi 2 "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good and Clean Goverment*)" sasaran jangka menengah yang dirumuskan adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Kondisi dan Proyeksi Kedepan adalah :

- a. Kondisi pengelolaan keuangan dan aset daerah saat ini telah dinilai cukup baik dan sedang melakukan beberapa penyesuaian terkait keluarnya regulasi baru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peningkatan kemampuan aparat Pengelola Keuangan Daerah, kemampuan dan keterampilan aparat pengelola keuangan perlu terus diupayakan secara berkelanjutan. Hal ini mengingat tuntutan peraturan perundang-undangan yang terus berkembang.
- c. Peningkatan serta penyempurnaan pengelolaan aset daerah yaitu kedepan seluruh Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dikelola dan tertata dengan baik.
- d. Intensifikasi PAD untuk mengoptimalkan potensi yang telah ada melalui pemutakhiran data PBB P2 dan penyesuaian NJOP.

Berdasarkan uraian diatas isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas manajemen Barang Milik Daerah
3. Meningkatnya Sumber Daya Manusia
4. Meningkatnya pengelolaan PAD
5. Meningkatnya Kualitas pengendalian internal

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah dilakukan menggunakan analisa metode SWOT:

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan/Potensi (Strength)

- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi
- Tersedianya alokasi anggaran yang memadai
- Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya program aplikasi komputer
- Kemampuan SDM

b. Kelemahan (Weaknes)

- Terbatasnya sarana penunjang konektifitas kerja
- Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya

2. Faktor Eksternal:

a. Kesempatan/Peluang (Oportunity)

- Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan perangkat daerah
- Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif

b. Tantangan/Ancaman (Treath)

- Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

#### PERMASALAHAN

Beberapa peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia belum memadai
2. Pengelolaan PAD yang belum optimal
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum optimal
4. Belum maksimalnya Pengelolaan SPD sesuai sumber dana yang tersedia
5. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah belum maksimal
6. Kualitas perencanaan anggaran belum memadai

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai Tugas Pokok :

- a. Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli daerah;
- b. Meningkatkan kompetensi aparatur Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas aparatur yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja, baik antar OPD dan lembaga lain yang saling bekerja sama;
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi yang tertib, disiplin, konsisten sesuai dengan peraturan, melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- e. Menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Aset Daerah;
- f. Menyusun dan merencanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah.

#### SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

#### SARANA DAN PRASARANA

1. Meningkatkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang memuat kebijakan dan prioritas pembangunan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja.

Berikut ini hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 yang dijabarkan dalam Program/Kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu anggaran.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BPKD.



### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pembangunan Daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan Nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ditingkat Nasional maupun provinsi.

Adapaun Visi dari Direktorat Jendral Keuangan adalah "Terkemuka Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipasif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel Dan Kompetitif"

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipasif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel Dan Kompetitif yaitu :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- c. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif  
Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil  
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
- d. Pengelolaan Keuangan daerah yang Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan .
- e. Pengelolaan Keuangan daerah yang Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain .

Untuk mewujudkan visi tersebut memberikan tantangan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow utara untuk :

- a. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
- b. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
- c. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada indikator faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah Visi dan Misi. Tujuan Penetapan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah dan membantu Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah sendiri memiliki Dua Tujuan yang masing-masing mempunyai Indikator Kinerja, serta Tiga Sasaran dengan masing-masing indikator sasaran yakni :

1. Tujuan
  - a. Pengelolaan Keuangan Yang Makin Membaik dengan Indikator Kinerja: Laporan Keuangan pemerintahan daerah yang bebas dari salah saji material.
  - b. Pendapatan Asli Daerah Makin Meningkat dengan Indikator Kinerja: Kontribusi PAD terhadap APBD makin meningkat.
2. Sasaran
  - a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran Tingkat Kepatutan Pencanaan Anggaran, tingkat

kepatutan pelaksanaan anggaran, dan tingkat kepatutan penyajian laporan.

- b. Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah dengan indikator sasaran Presentase Menurunnya temuan terkait Penatausahaan BMD.
- c. Meningkatnya PAD dengan indikator sasaran persentase peningkatan PAD.

Gambaran Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dituangkan dalam tabel berikut :

<b>No.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengelolaan Keuangan Yang Makin baik  IK : Laporan keuangan pemerintah daerah yang bebas dari salah saji material	1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.1 Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran
			1.1.2 Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran
			1.1.3 Tingkat Kepatutan Penyajian Laporan
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen Barang Milik Daerah	1.2.1 Presentase Menurunnya temuan terkait Penatausahaan BMD
2.	Pendapatan Asli daerah Makin Meningkat  IK : Kontribusi PAD terhadap APBD makin meningkat	2.1 Meningkatnya PAD	2.1.1 Persentase Peningkatan PAD

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sejalan dengan itu adapun rincian rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada table 4.1 pada bagian sebelumnya.

Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan pendapatan keuangan dan barang milik daerah membantu Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama berupa pengelolaan pendapatan keuangan dan barang milik daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada dasarnya kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai pengelola untuk setiap perogram pengelolaan pendapatan keuangan dan barang milik daerah yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 – 2023 yaitu : “MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW UTARA YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA” maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pendapatan Daerah.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*Trickle Down Effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Boroko, Januari 2022

**Kepala Badan Pengelola Keuangan  
Daerah Kabupaten Bolaang  
Mongondow Utara**

**SIRAJUDIN LASENA, SE. M.Ec. Dev**  
**NIP. 19750108 200803 1 001**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Badan Pengelola Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Tahun 2023	Realisasi s.d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Renja 2022	Perkiraan Capaian Renstra s.d 2022	
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	%		Realisasi 2022	%
1	2		3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(5+7+9)	10=(9/3)
Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang										
Bidang Usuran Keuangan										
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Batas maksimal defisit APBD	%	5	5	5	2,01	159,78%	5	159,78%	31,96%
	Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD	Poin	2	2	2	2	100,00%	2	100,00%	50,00%
	Sistim informasi yang terpelihara dapat digunakan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	persentase dokumen SP2D yang berhasil diposting	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	persentase aspek LKPD yang menyajikan informasi penuh	%	100,00	85,71	100,00		0,00%	100	0,00%	0,00%
	Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya	%	70,00	50,00	60,00		0,00%	65	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ratio pendapatan dan belanja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	persentase rekomendasi hasil evaluasi APBD yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	persentase rekom verifikasi RKA yang ditindaklanjuti oleh OPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	persentase hasil verifikasi DPA yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	Ketepatan waktu pemantapan kesepakatan KUA dan PPAS	indeks	2	2	2	2	100,00%	2	100,00%	50,00%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan belanja	kali	3	3	3	3	100,00%	3	100,00%	33,33%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen ranperda APBD yang disusun	dokumen	30	30	30	30	100,00%	30	100,00%	3,33%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	terlaksananya koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi ranperda perubahan APBD	kali	1	1	1	1	100,00%	1	100,00%	100,00%
	Jumlah dokumen ranperda perubahan APBD yang disusun	eks	30	30	30	30	100,00%	100,00%	100,00%	3,33%
	jumlah dokumen ranperbup perubahan APBD yang disusun	eks	15	15	15	15	100,00%	100,00%	100,00%	6,67%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	persentase OPD yang dilakukan verifikasi RKA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	1,00%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	persentase OPD yang dilakukan verifikasi DPA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	1,00%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan waktu penyusunan RKUA dan PPAS	indeks	2	2	2	2	100,00%	2	100,00%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan waktu penyusunan perubahan RKUA dan PPAS	indeks	2	2	2	2	100,00%	2	100,00%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah rancangan regulasi yang disusun	persil	3	3	3	2	66,67%	3	66,67%	22,22%
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	persentase ketersediaan data SIPD bidang pengelolaan keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100%	100,00%	1,00%
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	terpeliharanya sistim informasi pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah	bh	2	2	2	2	100,00%	2	100,00%	50,00%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase SP2D yang diterbitkan melalui daftar penunji	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100%	100,00%	1,00%
	persentase dokumen SPM yang diajukan secara online	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100%	100,00%	1,00%

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	persentase OPD yang menyusun anggaran kas sesuai sumber dana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	persentase SP2D yang potongan PFK sesuai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
	persentase SP2D yang sesuai rekening penerima	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	persentase dokumen spm yang sesuai kode rekening	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
	persentase spm yang dilengkapi data dokumen pendukung	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase SP2D BTT, bankeu, bagi hasil yang diterbitkan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
	SP2D BTT, Bankeu, bagi hasil tertata dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	persentase meningkatnya sumber penerimaan pembiayaan daerah	%	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,00	0,00%	0,00%
	persentase dokumen pelaksanaan anggaran yang update	%	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase usulan dana oleh objek penerima bankeu yang dilakukan kajian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase usulan dana oleh objek penerima BTT yang direalisasikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	persentase proporsi dana bagi hasil yang disalurkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen analisis investasi pemerintah daerah	dok	10	0	0	0	0,00%	10	0,00%	0,00%
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	jumlah dokumen perencanaan pinjaman pemerintah daerah	dok	10	0	0	0	0,00%	10	0,00%	0,00%
	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
	persentase SPD yang terbit sesuai sumber dana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persentase OPD yang menyajikan seluruh aspek pelaporan dengan berkualitas	%	100,00	85,71	100,00	85,71%	85,71%	100,00	85,71%	0,86%
	persentase SKTJM yang telah ditindaklanjuti	%	70,00	50	60,00		0,00%	65,00	0,00%	0,00%
	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	%	100,00		100,00	95,00	95,00%	100	95,00%	0,95%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	%	100,00				95,00%	100	95,00%	0,95%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	persentase OPD yang menyajikan informasi secara penuh	%	100,00	85,71	100,00		0,00%	100	0,00%	0,00%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	persentase OPD yang dibimbing dalam penyusunan laporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen LKPD yang dibuat	dok	20	20	20		0,00%	20	0,00%	0,00%
	jumlah kebijakan dan panduan teknis yang dibuat	persil	2	1	2	1	50,00%	2	50,00%	25,00%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah kebijakan dan panduan teknis yang dibuat	persil	2	1	2	1	50,00%	2	50,00%	25,00%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	OPD	35	35	35	35	100,00%	35	100,00%	2,86%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	persentase OPD yang menyelesaikan tindaklanjut temuan tepat waktu	%	65,00	57,14%	53,00		0,00%	53,00	0,00%	0,00%
	persentase hasil tindaklanjut temuan yang direkonsiliasi	%	100,00	100,00	100,00		0,00%	100,00	0,00%	0,00%
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	persentase LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditanggapi/ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00		0,00%	100,00	0,00%	0,00%
Meningkatnya kualitas Manajemen Barang Milik Daerah	persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan BMD	%	12,00	9,50%	11,00	11,00	100,00%	11.5	100,00%	8,33%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan	%	100,00	82,85%	85,71	85,71	100,00%	100	100,00%	1,00%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase OPD yang mengintegrasikan SIMDA BMD dengan simda Keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Penyusunan Standar Harga	persentase SSH yang tersedia dalam simda integrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	persentase OPD yang menyusun perencanaan kebutuhan BMD	%	100,00	100,00	85,71	85,71	100,00%	100	100,00%	1,00%

Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD dengan baik	unit	55	50	55	55	100,00%	55	100,00%	1,82%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah OPD/unit yang dibimbing melakukan updating KIB dan KIR	unit	55	50	55	55	100,00%	55	100,00%	1,82%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan BMD yang disusun	eks	10	10	10	10	100,00%	10	100,00%	10,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah	persentase aset tanah dan bangunan pemda yang tersertifikasi	%	97.5	15,00	40,00	20,00	50,00%	50,00	50,00%	50,00%
Penilaian Barang Milik Daerah	persentase BMD yang tidak ekonomis yang dilakukan penilaian	%	95,00	95,00	75,00	100,00	133,33%	85,00	133,33%	1,40%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	persentase pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	%	100,00	60,00	100,00		0,00%	100,00	0,00%	0,00%
	persentase BMD layak penghapusan yang dilakukan penghapusan	%	95,00	95,00	80,00	100,00	125,00%	85,00	125,00%	1,32%
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah regulasi pengelolaan BMD yang dibuat	persil	0	0	1	0	0,00%	2	0,00%	0,00%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase penyalagunaan BMD yang terselesaikan	%	95,00	30,00	75,00	50,00	66,67%	80,00	66,67%	0,70%
Pendapatan Asli Daerah makin meningkat	Kontribusi PAD terhadap APBD makin meningkat	%	12,75	3.89	12,25	2,95	24,08%	12,5	24,08%	1,89%
Meningkatnya Kinerja BPKD	Nilai pencapaian kinerja	%	100,00	90,00	100,00	90,00	90,00%	100	90,00%	0,90%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	rata-rata capaian kinerja output/outcome program	%	90,00	85,00	90,00	85,00	94,44%	90,00	94,44%	1,05%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	rata-rata capaian kinerja output kegiatan	%	100,00	92,30	100,00	92,30	92,30%	100	92,30%	0,92%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen renja dan renja perubahan meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perjanjian kinerja	eks	10	10	10	10	100,00%	10	100,00%	10,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	%	90,00	85,00	90,00	85,00	94,44%	90	94,44%	1,05%
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	zero temuan pengelolaan keuangan pada BPKD	poin	4	4	4	4	0,00%	4	0,00%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase SPM yang diajukan lengkap dengan dokumen pendukungnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	seluruh aspek penyajian laporan keuangan skpd terpenuhi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD	poin	2	2	2	2	100,00%	2	100,00%	50,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	zero temuan penatausahaan BMD pada BPKD	poin	4	4	4	4	100,00%	4	100,00%	25,00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang dibuat	eks	10	10	10	10	100,00%	10	100,00%	10,00%
	persentase BMD sesuai peruntukannya	%	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase kelengkapan kartu kendali/kartu inventaris barang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan sarana sesuai kebutuhan	%	85,00	70,00	75,00	70,00	93,33%	80	93,33%	1,10%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan yang diadakan	unit	0	1	0	0	0,00%	1	0,00%	0,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	unit	4	4	0	0	0,00%	4	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	unit	10	10	10	10	100,00%	10	100,00%	10,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
	persentase dokumen wajib bermetrai yang memiliki legalitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	iuran rekening listrik terpenuhi	bln	12	12	12	12	100,00%	12	100,00%	8,33%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	iuran rekening air terpenuhi	bln	12	12	12	12	100,00%	12	100,00%	8,33%
	terpeliharanya kebersihan kantor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana/BMD yang layak pakai	%	90,00	80,00	85,00	85,00	100,00%	85	100,00%	1,11%



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang terpelihara	unit	1	1	1	1	100,00%	1	100,00%	100,00%	
	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayar pajak tepat waktu	unit	1	1	1	1	100,00%	1	100,00%	100,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	2	2	2	2	100,00%	2	100,00%	50,00%	
	Jumlah kendaraan roda dua operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	10	10	10	10	100,00%	10	100,00%	10,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	unit	20	20	20	20	100,00%	20	100,00%	5,00%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase ruang kerja sesuai standar kelayakan dan kenyamanan kerja	%	80,00	60,00	60,00	60,00	100,00%	75,00	100,00%	1,25%	
	persentase kegiatan rapat, konsultasi yang terkoordinasi pelaksanaannya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00%	90,00	100,00%	1,11%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00%	90,00	100,00%	1,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kategori penilaian tamu terhadap pelayanan BPKD	Poin	4	4	4	4	100,00%	4	100,00%	25,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase undangan rakor dan konsultasi yang dihadiri	%	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00%	100,00	90,00%	0,90%	
	persentase kegiatan rakor yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%	1,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase SDM yang berkompentensi di bidang sistem informasi sesuai kebutuhan	%	73,68	68,57	68,57	68,57	100,00%	71,05	100,00%	#VALUE!	
	persentase SDM yang berkompentensi di bidang pengelolaan BMD	%	85,00	50,00	75,00	55,00	73,33%	75,00	73,33%	0,86%	
	persentase SDM yang berkompentensi dibidang pengelolaan keuangan	%	83,00	20,00	50,00	50,00	100,00%	69,00	100,00%	1,20%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta di bidang pengelolaan keuangan	orang	70	50	70	50	71,43%	70	71,43%	1,02%	
	jumlah peserta pelatihan di bidang pengelolaan BMD	orang	3	2	2	2	100,00%	2	100,00%	33,33%	
	Jumlah peserta pelatihan dibidang sistem informas	orang	3	2	3	3	100,00%	3	100,00%	33,33%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang diadakan	Pasang	40	0	36	36	100,00%	0	100,00%	2,50%	
	jumlah atribut pakaian dinas yang diadakan	bh	40	0	36	36	100,00%	0	100,00%	2,50%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	persentase rata-rata kehadiran pegawai	%	95,00	80,00	95,00	80,00	84,21%	95	84,21%	0,89%	
	persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%	
	persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	95,00	95,00%	100,00	95,00%	0,95%	
Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase peningkatan PAD	%	10,00	9,89	10,00	(17,29)	(172,90)	10,00	(172,90)	-1729,00%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase peningkatan pajak daerah	%	10,00	3,78	10,00	15,8	158,00%	10,00	158,00%	15,80%	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase capaian pajak daerah	%	100,00	102,02	100,00	106,44	106,44%	100,00	106,44%	1,06%	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah wajib pajak yang terdata	WP	38000	38000	37.250	39.090	104,94%	37500	104,94%	0,00%	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	persentase basis data pajak daerah yang update	%	60,00	10,00	50,00	30,00	60,00%	55,00	60,00%	1,00%	
	persentase pelaporan pajak daerah tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah objek pajak baru yang direncanakan	objek	35	30	25	76	304,00%	30	304,00%	8,69%	
	persentase NJOP yang update sesuai peta ZNT	%	20,00	0,00	15,00	0,00	0,00%	15	0,00%	0,00%	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	persentase wilayah WP yang dilakukan penyuluhan/pembinaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00%	1,00%	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	persentase wajib pajak dan retribusi yang menunaikan kewajibannya tepat waktu	%	90,00	25,00	80,00	30,00	37,50%	85	37,50%	0,42%	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	persentase basis data retribusi daerah yang update	%	60,00	45,00	50,00	50,00	100,00%	55	100,00%	1,67%	
	jumlah objek retribusi baru yang direncanakan	objek	3	3	4	4	100,00%	1	100,00%	33,33%	

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	unit	15	0	5	0	0,00%	10	0,00%	0,00%
Penagihan Pajak Daerah	persentase piutang pajak dilunasi	%	10		10	57	570,00%	15	570,00%	57,00%

**Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**




**SIRAJUDIN LASENA, SE. M.Ec. Dev**  
**NIP. 19750108 200803 1 001**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  
Tahun Anggaran 2021**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra 2018-2023				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran		100%	100%	100%	100%	97,22%	100%	100%	100%	
2	Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tingkat Kepatutan Penyajian LKPD		100%	100%	100%	100%	85.71%		100%	100%	Belum ada LKPD Audited
4	Persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan BMD		10%	11%	11.5%	12%	9.5%		11%	11.5%	Belum ada LKPD Audited
5	Presentase peningkatan PAD		10%	10%	10%	10%	9,89%	(17,29)	10%	10%	

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

  
SIRAJUDIN LASENA, SE. M.Ec. Dev  
NIP. 19750108 200803 1 001

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu (Rp.000)	CatatanPenting
	-1	-2	-3	-4	-5											
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bolmut	Batas maksimal defisit APBD	5%	115.238.150.867,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bolmut	Batas maksimal defisit APBD	5%	115.238.150.867,00						
			Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD	2 org				Ketepatan waktu penetapan Perkada Penjabaran APBD	2 org							
			Sistim informasi yang terpelihara dapat digunakan tepat waktu	100%				Sistim informasi yang terpelihara dapat digunakan tepat waktu	100%							
			persentase dokumen SP2D yang berhasil diposting	100%				persentase dokumen SP2D yang berhasil diposting	100%							
			Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik	100%				Persentase Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelola dengan baik	100%							
			Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu	100%				Persentase Ketersediaan database perbendaharaan yang tepat waktu	100%							
			persentase aspek LKPD yang menyajikan informasi penuh	100%				persentase aspek LKPD yang menyajikan informasi penuh	100%							
			Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya	65%				Persentase Penyelesaian tindak lanjut Temuan termasuk tahun sebelumnya	70%							
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bolmut	Ratio pendapatan dan belanja	100%	438.672.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bolmut	Ratio pendapatan dan belanja	100%	438.672.600,00						
			persentase rekomendasi hasil evaluasi APBD yang ditindaklanjuti	100%				persentase rekomendasi hasil evaluasi APBD yang ditindaklanjuti	100%							
			persentase rekom verifikasi RKA yang ditindaklanjuti oleh OPD	100%				persentase rekom verifikasi RKA yang ditindaklanjuti oleh OPD	100%							
			persentase hasil verifikasi DPA yang ditindaklanjuti	100%				persentase hasil verifikasi DPA yang ditindaklanjuti	100%							
			Ketepatan waktu pemantapan kesepakatan KUA dan PPAS	2 indeks				Ketepatan waktu pemantapan kesepakatan KUA dan PPAS	2 indeks							
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bolmut	Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan belanja	3 poin				Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan belanja	3 poin							
			persentase kegiatan pada PPAS yang konsisten dengan RKPD	100%				persentase kegiatan pada PPAS yang konsisten dengan RKPD	100%							
			terlaksananya koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi ranperda APBD	2 poin				terlaksananya koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi ranperda APBD	2 poin							
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bolmut	Jumlah dokumen ranperda APBD yang disusun	30 dok	129.281.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bolmut	Jumlah dokumen ranperda APBD yang disusun	30 dok	129.281.200,00						
			jumlah dokumen ranperbup APBD yang disusun	15 dok				jumlah dokumen ranperbup APBD yang disusun	15 dok							
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bolmut	terlaksananya koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi ranperda perubahan APBD	1 poin	124.915.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bolmut	terlaksananya koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi ranperda perubahan APBD	1 poin	124.915.500,00						
			Jumlah dokumen ranperda perubahan APBD yang disusun	30 eks				Jumlah dokumen ranperda perubahan APBD yang disusun	30 eks							
			jumlah dokumen ranperbup perubahan APBD yang disusun	15 eks				jumlah dokumen ranperbup perubahan APBD yang disusun	15 eks							
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bolmut	persentase OPD yang dilakukan verifikasi RKA	100%				persentase OPD yang dilakukan verifikasi RKA	100%							
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bolmut	persentase OPD yang dilakukan verifikasi DPA	100%				persentase OPD yang dilakukan verifikasi DPA	100%							
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bolmut	Ketepatan waktu penyusunan RKUA dan PPAS	2 indeks	90.825.500,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bolmut	Ketepatan waktu penyusunan RKUA dan PPAS	2 indeks	90.825.500,00						
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bolmut	Ketepatan waktu penyusunan perubahan RKUA dan PPAS	2 indeks	93.650.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bolmut	Ketepatan waktu penyusunan perubahan RKUA dan PPAS	2 indeks	93.650.400,00						

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bolmut	Jumlah rancangan regulasi yang disusun	3 poin		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bolmut	Jumlah rancangan regulasi yang disusun	3 poin	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bolmut	persentase ketersediaan data SIPD bidang pengelolaan keuangan daerah	100%		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bolmut	persentase ketersediaan data SIPD bidang pengelolaan keuangan daerah	100%	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bolmut	terpeliharanya sistim informasi pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah	2 buah		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Bolmut	terpeliharanya sistim informasi pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah	2 buah	
		jumlah item data yang tersedia tepat waktu	4 jns				jumlah item data yang tersedia tepat waktu	4 jns	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bolmut	persentase SP2D yang diterbitkan melalui daftar penguji	100%	363.726.500,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bolmut	persentase SP2D yang diterbitkan melalui daftar penguji	100%	363.726.500,00
		persentase dokumen SPM yang diajukan secara online	100%				persentase dokumen SPM yang diajukan secara online	100%	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bolmut	persentase OPD yang menyusun anggaran kas sesuai sumber dana	100%	34.160.400,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bolmut	persentase OPD yang menyusun anggaran kas sesuai sumber dana	100%	34.160.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bolmut	persentase SP2D yang potongan PFK sesuai	100%	75.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bolmut	persentase SP2D yang potongan PFK sesuai	100%	75.000.000,00
		persentase SP2D yang sesuai rekening penerima	100%				persentase SP2D yang sesuai rekening penerima	100%	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bolmut	persentase dokumen spm yang sesuai kode rekening	100%	95.666.100,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bolmut	persentase dokumen spm yang sesuai kode rekening	100%	95.666.100,00
		persentase spm yang dilengkapi data dokumen pendukung	100%				persentase spm yang dilengkapi data dokumen pendukung	100%	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bolmut	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	100%	60.000.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bolmut	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	100%	60.000.000,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bolmut	persentase SPD yang terbit sesuai sumber dana	100%	98.900.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bolmut	persentase SPD yang terbit sesuai sumber dana	100%	98.900.000,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bolmut	persentase SP2D BTT, bankeu, bagi hasil yang diterbitkan sesuai standar	100%	113.892.150.667,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bolmut	persentase SP2D BTT, bankeu, bagi hasil yang diterbitkan sesuai standar	100%	113.892.150.667,00
		SP2D BTT, Bankeu, bagi hasil tertatah dengan baik	100%				SP2D BTT, Bankeu, bagi hasil tertatah dengan baik	100%	
		persentase meningkatnya sumber penerimaan pembiayaan daerah	15%				persentase meningkatnya sumber penerimaan pembiayaan daerah	15%	
		persentase dokumen pelaksanaan anggaran yang update	100%				persentase dokumen pelaksanaan anggaran yang update	100%	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bolmut	persentase usulan dana oleh objek penerima bankeu yang dilakukan kajian	100%	111.887.628.600,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bolmut	persentase usulan dana oleh objek penerima bankeu yang dilakukan kajian	100%	111.887.628.600,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bolmut	persentase usulan dana oleh objek penerima BTT yang direalisasikan	100%	2.004.522.067,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bolmut	persentase usulan dana oleh objek penerima BTT yang direalisasikan	100%	2.004.522.067,00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bolmut	persentase proporsi dana bagi hasil yang disalurkan	100%		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bolmut	persentase proporsi dana bagi hasil yang disalurkan	100%	
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Bolmut	jumlah dokumen analisis investasi pemerintah daerah	10 dok		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Bolmut	jumlah dokumen analisis investasi pemerintah daerah	0 dok	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Bolmut	jumlah dokumen perencanaan pinjaman pemerintah daerah	10 dok		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Bolmut	jumlah dokumen perencanaan pinjaman pemerintah daerah	0 dok	
		persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	100%				persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	100%	

		persentase SPD yang terbit sesuai sumber dana	100%				persentase SPD yang terbit sesuai sumber dana	100%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bolmut	persentase OPD yang menyajikan seluruh aspek pelaporan dengan berkualitas	100%	543.601.100,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bolmut	persentase OPD yang menyajikan seluruh aspek pelaporan dengan berkualitas	100%	543.601.100,00
		persentase SKTJM yang telah ditindaklanjuti	65%				persentase SKTJM yang telah ditindaklanjuti	70%	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bolmut	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	100%	37.107.200,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bolmut	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	100%	37.107.200,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bolmut	persentase OPD yang menyajikan informasi secara penuh	100%	237.700.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bolmut	persentase OPD yang menyajikan informasi secara penuh	100%	237.700.000,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bolmut	persentase OPD yang dibimbing dalam penyusunan laporan keuangan	100%	48.887.500,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bolmut	persentase OPD yang dibimbing dalam penyusunan laporan keuangan	100%	48.887.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bolmut	jumlah dokumen LKPD yang dibuat	20 dok	59.044.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bolmut	jumlah dokumen LKPD yang dibuat	20 dok	59.044.700,00
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bolmut	jumlah kebijakan dan panduan teknis yang dibuat	2 per bungkus	64.206.400,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bolmut	jumlah kebijakan dan panduan teknis yang dibuat	2 per bungkus	64.206.400,00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bolmut	jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	35 opd	96.655.300,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Bolmut	jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	35 OPD	96.655.300,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Bolmut	persentase OPD yang menyelesaikan tindaklanjut temuan tepat waktu	65%		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Bolmut	persentase OPD yang menyelesaikan tindaklanjut temuan tepat waktu	57%	
	Bolmut	persentase hasil tindaklanjut temuan yang direkonsiliasi	100%				persentase hasil tindaklanjut temuan yang direkonsiliasi	100%	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bolmut	persentase LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditanggapi/ditindaklanjuti	100%		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	Bolmut	persentase LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditanggapi/ditindaklanjuti	100%	
Meningkatnya kualitas Manajemen Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan BMD	11,50%		Meningkatnya kualitas Manajemen Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase menurunnya temuan terkait penatausahaan BMD	12%	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bolmut	Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan	88,57%	664.016.780,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bolmut	Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan	91,43%	664.016.780,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase OPD yang mengintegrasikan SIMDA BMD dengan simda Keuangan	100%	664.016.780,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase OPD yang mengintegrasikan SIMDA BMD dengan simda Keuangan	100%	664.016.780,00
Penyusunan Standar Harga	Bolmut	persentase SSH yang tersedia dalam simda integrasi	100%	60.565.600,00	Penyusunan Standar Harga	Bolmut	persentase SSH yang tersedia dalam simda integrasi	100%	60.565.600,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase OPD yang menyusun perencanaan kebutuhan BMD	100%	26.214.700,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase OPD yang menyusun perencanaan kebutuhan BMD	100%	26.214.700,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bolmut	jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD dengan baik	55 unit	80.943.300,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bolmut	jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD dengan baik	55 unit	80.943.300,00

Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bolmut	jumlah OPD/unit yang dibimbing melakukan updating KIB dan KIR	55 unit	94.058.300,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bolmut	jumlah OPD/unit yang dibimbing melakukan updating KIB dan KIR	55 unit	94.058.300,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	100%	26.544.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	100%	26.544.000,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bolmut	jumlah laporan BMD yang disusun	10 eks	35.000.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bolmut	jumlah laporan BMD yang disusun	10 eks	35.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase aset tanah dan bangunan pemda yang tersertifikasi	50%	169.049.480,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase aset tanah dan bangunan pemda yang tersertifikasi	95%	169.049.480,00
Penilaian Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase BMD yang tidak ekonomis yang dilakukan penilaian	85%	70.936.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase BMD yang tidak ekonomis yang dilakukan penilaian	95%	70.936.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100%	35.275.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	100%	35.275.000,00
		persentase BMD layak penghapusan yang dilakukan penghapusan	90%				persentase BMD layak penghapusan yang dilakukan penghapusan	95%	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bolmut	jumlah regulasi pengelolaan BMD yang dibuat	2 poin	65.430.400,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bolmut	jumlah regulasi pengelolaan BMD yang dibuat	0 poin	65.430.400,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase penyalagunaan BMD yang terselesaikan	80%		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bolmut	persentase penyalagunaan BMD yang terselesaikan	95%	
Pendapatan Asli Daerah makin meningkat	Bolmut	Kontribusi PAD terhadap APBD makin meningkat	12,50%		Pendapatan Asli Daerah makin meningkat	Bolmut	Kontribusi PAD terhadap APBD makin meningkat	12,75%	
Meningkatnya Kinerja BPKD	Bolmut	Nilai pencapaian kinerja	100%		Meningkatnya Kinerja BPKD	Bolmut	Nilai pencapaian kinerja	100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bolmut	rata-rata capaian kinerja output/outcome program	90%	13.483.530.587,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bolmut	rata-rata capaian kinerja output/outcome program	90%	13.483.530.587,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolmut	rata-rata capaian kinerja output kegiatan	100%	44.753.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolmut	rata-rata capaian kinerja output kegiatan	100%	44.753.600,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolmut	tersusunnya dokumen renja dan renja perubahan	10eks	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bolmut	tersusunnya dokumen renja dan renja perubahan	10 eks	15.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolmut	meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perjanjian kinerja	90%	29.753.600,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bolmut	meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perjanjian kinerja	90%	29.753.600,00
		persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	100%			persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolmut	zero temuan pengelolaan keuangan pada BPKD	4 poin	10.591.046.082,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bolmut	zero temuan pengelolaan keuangan pada BPKD	4 poin	10.591.046.082,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bolmut	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	10.533.658.882,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bolmut	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	10.533.658.882,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bolmut	Terpenuhinya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	100%		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bolmut	Terpenuhinya Administrasi Pelaksana Tugas ASN	100%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolmut	persentase SPM yang diajukan lengkap dengan dokumen pendukungnya	100%	57.387.200,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bolmut	persentase SPM yang diajukan lengkap dengan dokumen pendukungnya	100%	57.387.200,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bolmut	seluruh aspek penyajikan laporan keuangan skpd terpenuhi	100%	
		ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD	2 poin			ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD	2 poin		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bolmut	zero temuan penatausahaan BMD pada BPKD	4 poin		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bolmut	zero temuan penatausahaan BMD pada BPKD	4 poin	

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bolmut	jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang dibuat	0 eks		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bolmut	jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD yang dibuat	0 eks	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolmut	persentase BMD sesuai peruntukannya	100%		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bolmut	persentase BMD sesuai peruntukannya	100%	
		persentase kelengkapan kartu kendali/kartu inventaris barang	100%				persentase kelengkapan kartu kendali/kartu inventaris barang	100%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolmut	persentase ketersediaan sarana sesuai kebutuhan	80%	299.023.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bolmut	persentase ketersediaan sarana sesuai kebutuhan	85%	299.023.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bolmut	jumlah gedung kantor atau bangunan yang diadakan	1 unit	199.648.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bolmut	jumlah gedung kantor atau bangunan yang diadakan	0 unit	199.648.000,00
Pengadaan Mebel	Bolmut	Jumlah mebeleur yang diadakan	4 unit		Pengadaan Mebel		Jumlah mebeleur yang diadakan	4 unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolmut	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	10 unit	99.375.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolmut	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	10 unit	99.375.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolmut	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.772.613.305,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolmut	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.772.613.305,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bolmut	persentase dokumen wajib bermetrai yang memiliki legalitas	100%	9.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bolmut	persentase dokumen wajib bermetrai yang memiliki legalitas	100%	9.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bolmut	iuran rekening listrik terpenuhi	12 bln	1.034.893.325,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bolmut	iuran rekening listrik terpenuhi	12 bln	1.034.893.325,00
		iuran rekening air terpenuhi	12 bln				iuran rekening air terpenuhi	12 bln	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bolmut	terpeliharanya kebersihan kantor	100%	728.719.980,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bolmut	terpeliharanya kebersihan kantor	100%	728.719.980,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolmut	persentase sarana/BMD yang layak pakai	85%	245.835.600,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bolmut	persentase sarana/BMD yang layak pakai	90%	245.835.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bolmut	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang terpelihara	1 unit	40.980.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Bolmut	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang terpelihara	1 unit	40.980.000,00
		Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayar pajak tepat waktu	1 unit				Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dibayar pajak tepat waktu	1 unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bolmut	Jumlah kendaraan roda empat operasional atau lapangan yang terpelihara	2 unit	87.090.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bolmut	Jumlah kendaraan roda empat operasional atau lapangan yang terpelihara	2 unit	87.090.000,00
		Jumlah kendaraan roda dua operasional atau lapangan yang terpelihara	10 unit				Jumlah kendaraan roda dua operasional atau lapangan yang terpelihara	10 unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolmut	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	20 unit	28.320.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bolmut	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	20 unit	28.320.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bolmut	persentase ruang kerja sesuai standar kelayakan dan kenyamanan kerja	75%	89.445.600,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bolmut	persentase ruang kerja sesuai standar kelayakan dan kenyamanan kerja	80%	89.445.600,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolmut	persentase kegiatan rapat, konsultasi yang terkoordinasi pelaksanaannya	100%	367.583.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bolmut	persentase kegiatan rapat, konsultasi yang terkoordinasi pelaksanaannya	100%	367.583.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bolmut	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	90 bln	5.384.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bolmut	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	90 bln	5.384.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bolmut	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90%	17.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bolmut	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	17.500.000,00



Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bolmut	kategori penilaian tamu terhadap pelayanan BPKD	4 org	15.072.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bolmut	kategori penilaian tamu terhadap pelayanan BPKD	4 org	15.072.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolmut	persentase undangan rakor dan konsultasi yang dihadiri	100%	329.627.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bolmut	persentase undangan rakor dan konsultasi yang dihadiri	100%	329.627.000,00
		persentase kegiatan rakor yang difasilitasi	100%				persentase kegiatan rakor yang difasilitasi	100%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bolmut	jumlah jenis arsip yang dikelola secara elektronik	0 jns		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bolmut	jumlah jenis arsip yang dikelola secara elektronik	0 jns	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bolmut	persentase SDM yang berkompentensi di bidang sistem informasi sesuai kebutuhan	71,05%	162.676.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bolmut	persentase SDM yang berkompentensi di bidang sistem informasi sesuai kebutuhan	73,68%	162.676.000,00
		persentase SDM yang berkompentensi di bidang pengelolaan BMD	75%				persentase SDM yang berkompentensi di bidang pengelolaan BMD	85%	
		persentase SDM yang berkompentensi dibidang pengelolaan keuangan	69%				persentase SDM yang berkompentensi dibidang pengelolaan keuangan	83%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bolmut	jumlah peserta di bidang pengelolaan keuangan	70 org	162.676.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bolmut	jumlah peserta di bidang pengelolaan keuangan	70 org	162.676.000,00
		jumlah peserta pelatihan di bidang pengelolaan BMD	3 org				jumlah peserta pelatihan di bidang pengelolaan BMD	3 org	
		Jumlah peserta pelatihan dibidang sistem informas	3 org				Jumlah peserta pelatihan dibidang sistem informas	3 org	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bolmut	Jumlah Pakaian yang diadakan	0 pasang		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bolmut	Jumlah Pakaian yang diadakan	40 pasang	
		jumlah atribut pakaian dinas yang diadakan	o bh				jumlah atribut pakaian dinas yang diadakan	4o bh	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bolmut	persentase rata-rata kehadiran pegawai	95%		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bolmut	persentase rata-rata kehadiran pegawai	95%	
		persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu	100%				persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu	100%	
		persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	100%				persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	100%	
Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Bolmut	Persentase peningkatan PAD	10%		Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Bolmut	Persentase peningkatan PAD	10%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bolmut	persentase peningkatan pajak daerah	10%	731.692.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bolmut	persentase peningkatan pajak daerah	10%	731.692.900,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bolmut	persentase capaian pajak daerah	100%	731.692.900,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bolmut	persentase capaian pajak daerah	100%	731.692.900,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bolmut	jumlah wajib pajak yang terdata	37500 WP	97.798.800,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bolmut	jumlah wajib pajak yang terdata	38000 WP	97.798.800,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bolmut	persentase basis data pajak daerah yang update	55%	43.618.500,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bolmut	persentase basis data pajak daerah yang update	60%	43.618.500,00
		persentase pelaporan pajak daerah tepat waktu	100%				persentase pelaporan pajak daerah tepat waktu	100%	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bolmut	jumlah objek pajak baru yang direncanakan	org/jam/pelaj	99.317.300,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bolmut	jumlah objek pajak baru yang direncanakan	35 org	99.317.300,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bolmut	persentase NJOP yang update sesuai peta ZNT	15%	80.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bolmut	persentase NJOP yang update sesuai peta ZNT	20%	80.000.000,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bolmut	persentase wilayah WP yang dilakukan penyuluhan/pembinaan	100%	89.062.100,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bolmut	persentase wilayah WP yang dilakukan penyuluhan/pembinaan	100%	89.062.100,00

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bolmut	persentase wajib pajak dan retribusi yang menunaikan kewajibannya tepat waktu	85%	33.590.200,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bolmut	persentase wajib pajak dan retribusi yang menunaikan kewajibannya tepat waktu	90%	33.590.200,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bolmut	persentase basis data retribusi daerah yang update	55%		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bolmut	persentase basis data retribusi daerah yang update	60%	
		jumlah objek retribusi baru yang direncanakan	1%				jumlah objek retribusi baru yang direncanakan	3%	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bolmut	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	10 unit	245.750.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bolmut	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	15 unit	245.750.000,00
Penagihan Pajak Daerah	Bolmut	persentase piutang pajak dilunasi	15%	42.556.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Bolmut	persentase piutang pajak dilunasi	20%	42.556.000,00

**Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

  
**SIRAJUDIN LASENA, SE. M.Ec. Dev**  
**NIP. 19750108 200803 1 001**

**TABEL 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah**

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Tahun 2024	
		Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Pagu Indikatif
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	- 9,00	-10
Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang		KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA						
Bidang Urusan Keuangan		KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA						
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Batas maksimal defisit APBD</b>	<b>KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</b>	<b>5,00</b>	<b>115.238.150.867,00</b>	<b>DAU</b>			
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Ratio pendapatan dan belanja</b>	<b>KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</b>	<b>100,00</b>	<b>574.775.000,00</b>	<b>DAU</b>			
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen ranperda APBD yang disusun	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	30,00	156.000.000,00	DAU			
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	terlaksananya koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi ranperda perubahan APBD	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	1,00	135.000.000,00	DAU			
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan waktu penyusunan RKUA dan PPAS	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,00	175.000.000,00	DAU			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan waktu penyusunan perubahan RKUA dan PPAS	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,00	93.650.400,00	DAU			
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	persentase ketersediaan data SIPD bidang pengelolaan keuangan daerah	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	44.224.000,00	DAU			
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	terpeliharanya sistim informasi pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	44.224.000,00	DAU			
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>persentase SP2D yang diterbitkan melalui daftar penguji</b>	<b>KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</b>	<b>100,00</b>	<b>229.546.000,00</b>	<b>DAU</b>			
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	persentase OPD yang menyusun anggaran kas sesuai sumber dana	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00		DAU			
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00		DAU			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	persentase SP2D yang potongan PFK sesuai	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	95.000.000,00	DAU			
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase SPD yang terbit sesuai dengan sumber dana	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00		DAU			
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	pesentase dokumen spm yang sesuai kode rekening	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	134.546,00	DAU			
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>persentase SP2D BTT, bankeu, bagi hasil yang diterbitkan sesuai standar</b>	<b>KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA</b>	<b>100,00</b>	<b>170.500.000,00</b>	<b>DAU</b>			
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase usulan dana oleh objek penerima bankeu yang dilakukan kajian	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00		DAU			
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase usulan dana oleh objek penerima BTT yang direalisasikan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00		DAU			

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	jumlah dokumen perencanaan pinjaman pemerintah daerah	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	10,00	170.500.000,00	DAU			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persentase OPD yang menyajikan seluruh aspek pelaporan dengan <i>berkualitas</i>	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	734.111.000,00	DAU			
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	98.552.000,00	DAU			
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	persentase OPD yang menyajikan informasi secara penuh	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	295.500,00	DAU			
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	persentase OPD yang dibimbing dalam penyusunan laporan keuangan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00		DAU			
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen LKPD yang dibuat	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	20,00	68.403.000,00	DAU			
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah kebijakan dan panduan teknis yang dibuat	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,00	75.000.000,00	DAU			
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	3500%	196.655.000,00	DAU			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang melakukan pengadaan BMD sesuai kebutuhan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	91,43	713.913.000,00	DAU			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase OPD yang mengintegrasikan SIMDA BMD dengan <i>simda Keuangan</i>	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	713.913.000,00	DAU			
Penyusunan Standar Harga	persentase SSH yang tersedia dalam simda integrasi	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	105.000.000,00	DAU			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	persentase OPD yang menyusun perencanaan kebutuhan BMD	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	75.000.000,00	DAU			
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah regulasi pengelolaan BMD yang dibuat	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	1 Persil		DAU			
Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD dengan baik	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	55,00	86.761.000,00	DAU			
Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah OPD/unit yang dibimbing melakukan updating KIB dan KIR	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	55,00	115.000.000,00	DAU			
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	persentase hasil rekonsiliasi yang ditindaklanjuti	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	40.500.000,00	DAU			
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan BMD yang disusun	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	10,00	91.672.000,00	DAU			
Pengamanan Barang Milik Daerah	persentase aset tanah dan bangunan pemda yang tersertifikasi	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	95,00	63.604.000,00	DAU			
Penilaian Barang Milik Daerah	persentase BMD yang tidak ekonomis yang dilakukan penilaian	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	95,00	81.376.000,00	DAU			
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	persentase pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	55.000.000,00	DBH			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	rata-rata capaian kinerja output/outcome program	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	90,00	2.723.302.000,00	DAU			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	rata-rata capaian kinerja output kegiatan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	40.000.000,00	DAU			

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen renja dan renja perubahan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	10,00	25.000.000,00	PAD		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perjanjian kinerja	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	90,00	15.000.000,00	DAU		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	zero temuan pengelolaan keuangan pada BPKD	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	4,00	171.500.000,00	DAU		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	165.000.000,00	DAU		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase SPM yang diajukan lengkap dengan dokumen pendukungnya	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	6.500.000,00	DAU		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan sarana sesuai kebutuhan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	85,00	185.000.000,00	DAU		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan yang diadakan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	0,00	60.000.000,00	DAU		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	10,00	125.000.000,00	DAU		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	751.520.000,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase dokumen wajib bermetrai yang memiliki legalitas	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	9.000.000,00	DAU		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	iuran rekening listrik terpenuhi	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	12,00	457.520.000,00	DAU		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	285.000.000,00	DAU		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sarana/BMD yang layak pakai	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	90,00	618.113.000,00	DAU		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang terpelihara	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	1,00	78.850.000,00	DAU		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan roda empat operasional atau lapangan yang Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,00	88.513.000,00	DAU		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase ruang kerja sesuai standar kelayakan dan kenyamanan kerja	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	80,00	325.750.000,00	DAU		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kegiatan rapat, konsultasi yang terkoordinasi pelaksanaannya	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	532.167.000,00	DAU		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	90,00	7.500.000,00	DBH		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	20.475.000,00	DAU		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	kategori penilaian tamu terhadap pelayanan BPKD	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	4,00	45.000.000,00	DAU		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase undangan rakor dan konsultasi yang dihadiri	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	459.192.000,00	DAU		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase SDM yang berkompentensi di bidang sistem informasi sesuai kebutuhan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	73,68	425.000.000,00	DAU		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta di bidang pengelolaan keuangan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	70,00	425.000.000,00	DAU		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase peningkatan pajak daerah	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	10,00	624.836.000,00	DAU		
	persentase capaian pajak daerah	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	624.836.000,00	DAU		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah wajib pajak yang terdata	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	38.000,00	139.278.000,00	DAU		
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	persentase basis data pajak daerah yang update	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	60,00	116.468.000,00	DAU		
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah objek pajak baru yang direncanakan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	35,00	85.000.000,00	DAU		
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	persentase NJOP yang update sesuai peta ZNT	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	20,00		DAU		

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	persentase wilayah WP yang dilakukan penyuluhan/pembinaan	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	100,00	85.000.000,00	DAU			
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	persentase wajib pajak dan retribusi yang menunaikan kewajibannya tepat	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	90,00	105.750.000,00	PAD			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan retribusi daerah	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	15,00		DAU			
Penagihan Pajak Daerah	persentase piutang pajak dilunasi	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	20,00	178.339.000,00	DBH			

**Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

  
**SIRAJUDIN LASENA, SE. M.Ec. Dev**

**NIP. 19750108 200803 1 001**